

BAB III

INISIASI, PERKEMBANGAN DAN MANDAT CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY (CTI- CFF)

Isu lingkungan, terutama isu laut dan seluruh ekosistem yang ada didalamnya, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara saja. Karena laut mencangkup setiap negara yang memilikinya. Ekosistem ini pun menjadi rumah bagi ikan tangkap dari negara yang memiliki kawasan tersebut, jadi bukan menjadi tugas satu negara saja dalam melindungi laut dan seisinya. Kawasan Segitiga Terumbu Karang dunia menjadi kawasan yang memiliki ekosistem terbesar di dunia. Segitiga Terumbu Karang dianggap sebagai "pusat keragaman hayati laut dunia" karena mencakup 647 juta hektar daratan laut di dalam wilayah enam negara anggota (Security C. T., 2009). Menurut penelitian WWF, kawasan Segitiga Terumbu Karang ini merupakan rumah bagi 600 spesies karang dan 2.000 spesies ikan karang (Wihardandi, 2014).

Rusaknya terumbu karang di Kawasan Segitiga Terumbu Karang ini pun tidak lepas dari keserakahan manusia. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan, adalah melalui *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF) yang dibentuk oleh enam negara, yaitu Indonesia sebagai penggagas, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI CFF) mulai dari inisiasi pembentukan, kemudian perkembangan kerjasama tersebut hingga mandat yang diberikan kepada anggota CTI CFF.

A. Dinamika *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF)

Para ilmuwan telah mengidentifikasi sebuah kawasan *Coral Triangle* (CT) atau daerah segitiga terumbu karang di

wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati begitu tinggi, serta sumberdaya hayati laut yang sangat kaya yakni Indo-pasifik. Sumberdaya hayati CT ini memberikan manfaat bagi umat manusia, sayangnya, kehidupan sumberdaya hayati laut ini berada dalam ancaman seperti: penangkapan ikan berlebihan (overfishing), penangkapan ikan secara destruktif, perubahan iklim, dan polusi (Indonesia, 2014). Dengan melihat identifikasi tersebut, maka teretuslah inisiasi kerjasama multilateral yang dilakukan oleh enam negara yang terletak di kawasan coral triangle.

1. Sejarah Pembentukan CTI-CFF

Dilansir dari website resmi *National Coordinating Committee* (NCC) CTI Indonesia (nccctiindonesia.kkp.go.id) perjalanan CTI-CFF diawali pada bulan Maret 2006 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan sebuah pesan resmi pada pertemuan kedelapan para pihak pemerintah CT6 beserta Australia dan Amerika dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP-8 CBD di Brazil) yang menekankan pentingnya kawasan segitiga terumbu karang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengemukakan keinginannya untuk: (i) mempercepat pengembangan jejaring kawasan konservasi laut di kawasan coral triangle, dan (ii) memformalisasi kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan coral triangle. Pada bulan Agustus 2007, Presiden Yudhoyono menulis surat kepada tujuh kepala negara diantaranya Malaysia, Philippines, Kepulauan Solomon, Timor Timur, Papua Nugini, dan juga Australia serta Amerika Serikat. Dalam suratnya, Presiden mengusulkan inisiatif pembentukan *Coral Triangle* bagi terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. Inisiatif tersebut memiliki target untuk mendapatkan komitmen politis bersama tingkat tinggi bersama dengan ke-enam negara di kawasan segitiga terumbu karang, didukung oleh komitmen pendanaan internasional.

Pada awal bulan September 2007 (nccctiindonesia.kkp.go.id), CTI telah mendapatkan perhatian dari berbagai negara yang turut hadir dalam acara APEC *Summit* di Sydney, Australia. Sebanyak 21 kepala Negara secara resmi memasukan CTI di dalam APEC *Leader Declaration*. Sebelum masuk kedalam APEC *Leader Declaration*, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Bush, Perdana Menteri Australia, John Howard dan Perdana Menteri Papua Nugini, Somare. CTI juga sebelumnya telah didiskusikan di dalam *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dan ASEAN *Summit* pada bulan November 2007. Pada bulan yang Sama PM Somare dari Papua Nugini memberikan dukungan terhadap CTI yang tercantum didalam pidato yang disampaikan pada saat pertemuan antara perwakilan pemerintah dan NGO di kawasan pasifik.

Sebagai langkah selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, yang kala itu yang menjabat adalah Freddy Numberi, ia mengirimkan surat kepada menteri keenam Negara CT6 serta Amerika Serikat dan Australia. Surat tersebut adalah sebuah undangan kepada delapan negara tersebut, yang dimaksud untuk dapat menghadiri the *1st Senior Officials Meeting (SOM) of CTI* bulan Desember 2007 di Bali. *Senior Official Meeting* merupakan pertemuan yang dilakukan oleh para pejabat senior dari masing-masing negara anggota CTI-CFF.

Pertemuan tersebut memiliki beberapa tujuan umum sebagai berikut: (i) Mencapai kesepakatan tentang peluang dan tantangan pengembangan kawasan CTI, (ii) Mendiskusikan prinsip untuk pengembangan CTI dimasa datang, (iii) Mendiskusikan urgensi Rencana Aksi CTI, serta mencapai kesepakatan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Pertemuan berlangsung pada tanggal 6-7 Desember 2007 di Nusa Dua, Bali,

Indonesia serta dihadiri seluruh delegasi dari negara CT-6, dua negara donor serta tiga NGO Internasional (*The Nature Conservancy/ TNC, Conservation International/ CI dan World Wide Fund for Nature / WWF*).

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, *The First CTI Coordination Committee Meeting* dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Mei 2008 di Jakarta, yang dihadiri 6 negara CTI, para ahli, dan *observers* dari dalam dan luar negeri. Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan dalam pembukaannya, ia menyampaikan beberapa hal penting diantaranya: **(i)** perlunya menjaga komitmen dan konsistensi negara-negara CTI dalam penyelesaian *plan of action*, mengingat saat ini dukungan terhadap CTI dari lembaga-lembaga internasional dan donor sangat tinggi, **(ii)** penyusunan *plan of action* harus mengacu pada milestone/jadwal pertemuan tingkat menteri (*ministerial meeting*) pada akhir tahun 2008 dan pelaksanaan CTI Summit pada Mei 2009 di event *World Ocean* (nccctiindonesia.kkp.go.id).

Pada tanggal 8-10 September 2008 *The Second Coral Triangle Initiative (CTI) Coordination Committee Meeting* telah dilaksanakan di Honiara, Pulau Solomon (nccctiindonesia.kkp.go.id). Pertemuan tersebut merupakan salah satu proses dari penyusunan Rencana Aksi Regional Inisiatif (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security Regional Plan of Action*). Pertemuan tersebut dirancang untuk menghasilkan kesepakatan mengenai draf pertama Rencana Aksi Regional yang komprehensif. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini dan tuan rumah, Kepulauan Solomon. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Sdr. Yaya Mulyana (Dir. Konservasi dan Taman Nasional Laut) dengan anggota Dr. Jamaluddin. Di dalam pertemuan tersebut berapa isu masih memerlukan perundingan lebih lanjut, baik posisi tiap negara terhadap isu tersebut maupun obyektif dari isu yang dimaksud.

Penyelenggara pertemuan *The 3rd Coral Triangle Initiative (CTI) Coordination Committee (CCC)*, *Department of Agriculture, Gov. of the Philippines* dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Oktober 2008 di Manila, yang dihadiri oleh wakil dari 6 (enam) Negara anggota CTI, dan masing-masing negara mengirimkan lima anggota delegasi. Delegasi Indonesia terdiri dari wakil DKP, Bappenas, DepHut dan Deplu, dan observer dari Ditjen KP3K. Sedangkan sekretariat regional CTI diwakili oleh Dermawan, Eko Rudianto, Tony Wage dan wakil dari ADB, *World Bank*, USAID, WWF, CI, TNC, IUCN, *World fish*, dan Pemerintah Australia. Tujuan dari pertemuan CCC ke 3 ini membahas *Draft Regional Plan of Action (RPOA)* hasil *Honiara Meeting* tanggal 10 September 2008.

Pertemuan *The 2nd Senior Official Meeting (SOM)* merupakan pertemuan lanjutan setelah dilakukan pertemuan CCC ke 3 yang diselenggarakan oleh *Department of Agriculture, Gov. of the Philippines* pada tanggal 23 – 24 Oktober 2008 di Manila, yang dihadiri oleh *Senior Official* dari 6 (enam) Negara anggota CTI. Dalam hal ini, Duta Besar Amerika Serikat untuk Philippina, Kristie Kenney menyatakan komitmen pemerintah Amerika Serikat mendukung CTI dalam bentuk sumbangan awal sebesar 40 juta dolar AS untuk kegiatan awal dan sekretariat regional dan nasional di masing-masing negara anggota.

Setelah diadakannya SOM2, untuk menindak lanjuti hasil pencapaian dari SOM2 maka diadakanlah SOM3. Pertemuan SOM3 diadakan oleh *National Fishery Agency (NFA)* dan *Department of Environment and Conservation (DEC) Government of Papua New Guinea* pada tanggal 9 hingga 10 Maret 2009, yang diikuti wakil dari 6 (enam) Negara anggota CTI, dimana masing-masing Negara kembali mengirimkan 5 (lima) anggota delegasi.

Tujuan pertemuan SOM3 yakni membahas tujuan, draft agenda serta persiapan pelaksanaan *The 1st CTI Ministerial Meeting* dan *CTI Summit* di Manado Indonesia, *draft Ministerial Statement* dan *Leader's Declaration*, serta hasil pertemuan di Manila berupa *The Regional Plan of Action*. Dalam SOM3 terbentuklah kesepakatan antara lain: (i) Menyetujui dan menandatangani *Chairman Summary SOM3*, (ii) Menyetujui semua usulan *goals* yang akan diusulkan pada the 1st Ministerial Meeting (MM1) tanpa revisi, serta (iii) Menyetujui *Roadmap CTI* tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk persiapan *Leaders Declaration*.

Dalam pertemuan *Ministerial Meeting 1* para Menteri Negara CT6 sepakat untuk menerima muatan *Joint Ministerial Statement* yang terdiri atas 12 (dua belas) poin yang terlampir di bagian lampiran.

Gambar 3.1
Kantor Sekretariat CTI CFF di Manado, Indonesia



Sumber: NCC Indonesia

Sebagai bagian dari komitmennya untuk menjadi tuan rumah CTI-CFF serta komitmennya untuk mendukung kawasan konservasi terumbu karang yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Pemerintah Indonesia telah membangun Gedung Sekretariat Regional CTI-CFF yang baru dan sebuah CTI Pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan ke enam, Sharif C. Sutardjo menjelaskan bahwa Gedung CTI-CFF dan CTI Center merupakan salah satu bentuk komitmen Republik Indonesia guna mendukung program pelestarian kawasan terumbu karang yang memiliki biodiversitas kelautan tertinggi di dunia (Pravita, 2013).

Pembangunan gedung sekretariat CTI Center merupakan tindak lanjut hasil rekomendasi dari Senior Official Meeting kelima (SOM-5) dan Ministerial Meeting kedua (MM-2), yang menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah lokasi Sekretariat Regional (Manado, 2015). Kompleks bangunan ini terletak di Manado di lokasi bersejarah dimana para pemimpin dari enam negara Coral Triangle berkumpul untuk Konferensi Tingkat Tinggi CTI dan Konferensi Laut Dunia di tahun 2009.

2. Anggota CTI-CFF

Anggota dari CTI CFF ini terdiri dari enam negara atau biasa disebut *Coral Triangle Six* (CT6) yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia. Tidak hanya negara kawasan, adapun Mitra dan Kerjasama dengan lembaga maupun organisasi lainnya. Dari awal proses terbentuk negara CT6 antara lain Papua Nugini, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kepulauan Solomon, serta Timor Leste. Dibawah *member state* (CT6) terdapat NCC (*National Coordinating Committee*) sekaligus menjadi tangan kedua dari tiap negara. Tidak hanya itu, dari setiap negara, memiliki mitra lagi berupa akademisi maupun universitas yang ada di tiap-tiap negaranya. Negara yang menjadi mitra CTI CFF antara lain dari Australia dan Amerika Serikat.

Adapun development partner seperti Non-Governmental Organization (NGO) dunia maupun NGO yang ada di tiap negara, seperti *Global Environment Facility (GEF)*, *World Wildlife Fund for Nature (WWF)*, *Conservation International*, maupun *The Nature Conservancy*. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa adanya beberapa tataran anggota, mitra dan juga beberapa korporat yang menjalin kerjasama dengan CTI CFF.

Gambar 3.1
Gambar Susunan negara anggota, *National Coordinating Committee (NCC)*, beserta *Partners*

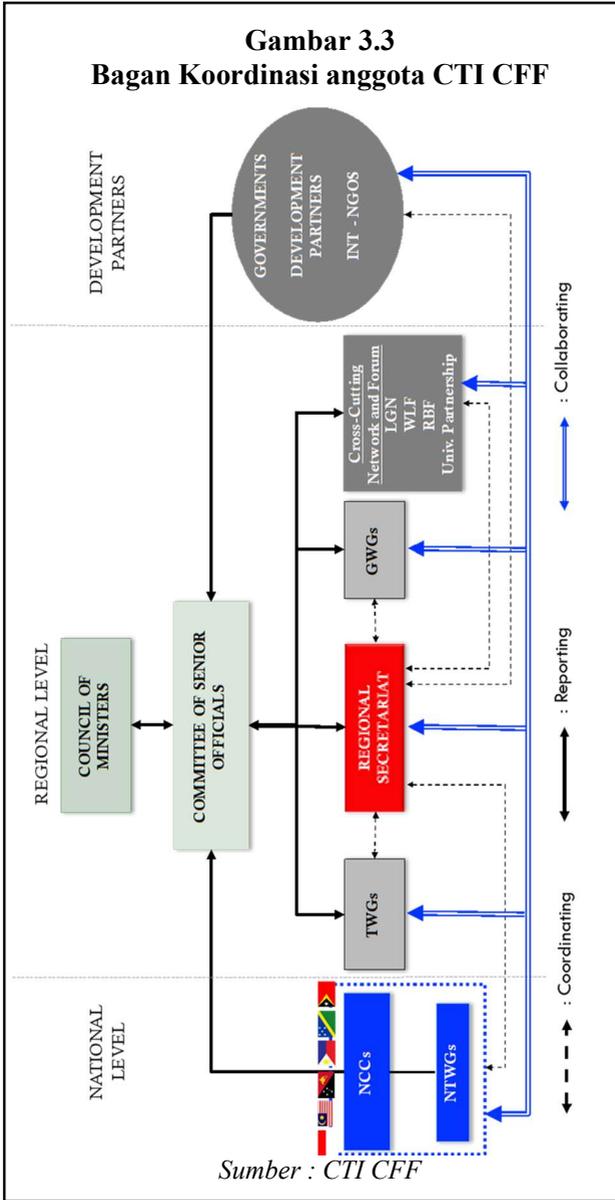


Sumber: Presentasi Muhammad Lukman, dalam acara *United Nation 18th Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea* UNHQ, New York, 17 Mei 2017

3. Struktur dan Bagan Koordinasi CTI CFF

Setiap organisasi pasti memiliki bagan koordinasi. Bagan ini berfungsi sebagai pedoman melakukan kegiatan sebuah organisasi. Terlihat bahwa koordinasi CTI CFF dibagi menjadi tiga level, national level, regional level dan development partners. Pada bagan diatas terlihat bahwa *council of ministers* membawahi *committee of senior official* dimana komite ini harus melaporkan segala bentuk kegiatan kepada council of ministers. Sedangkan committee of senior officer membawahi TGW, Sekretariat regional, GWGs, NCC, NTWGs, Government, Development partner, dan Int NGO. Berikut gambar bagan koordinasi CTI CFF.

Gambar 3.3
Bagan Koordinasi anggota CTI CFF



Lalu, masing-masing bagian melakukan kordinasi antara satusama lainnya. Terlihat sebagai contoh bahwa antara negara anggota CTI dapat bekerjasama dengan NGO internasional sebagaimana dalam praktiknya, kerjasama antara CTI dan WWF. Kerjasama dengan WWF bertujuan untuk memberikan perubahan serta dampak yang nyata di Segitiga Terumbu Karang yang membantu membawa keberlanjutan pada ekonomi perikanan, ketahanan pangan, meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. WWF di Segitiga Terumbu Karang terus berlanjut sebagai mitra di CTI-CFF dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi yang ada serta membangun kemitraan dan jaringan baru dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan visi bersama dan ambisi untuk CTI (Security C. T., 2009).

4. *Regional Plan of Action (RPOA) CTI-CFF*

Regional Plan of Action CTI (RPOA CTI) merupakan sebuah rencana aksi strategis yang terbagi dalam beberapa kelompok kerja yang menangani beberapa hal mengenai pemberdayaan ekosistem laut seperti (i) Pengelolaan bentang laut (ii) Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (iii) Kawasan perlindungan laut (iv) Adaptasi perubahan iklim, dan (v) Spesies laut yang terancam punah. Dari rancangan RPOA maka diturunkan ke dalam *National Plan of Action* (NPOA) tiap negara anggota. Negara anggota memiliki rencananya masing-masing terkait turunan dari rencana regional yang dimiliki oleh CTI CFF. Berikut enam negara dengan NPOA masing-masing.

a. Filipina

Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km (22.549 mil) yang menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia. Filipina termasuk sebagai pusat dari keanekaragaman hayati ekosistem terumbu karang

global, perairan Filipina memiliki hampir sepuluh persen dari terumbu karang dunia, bentangan-bentangan luas hutan mangrove, dan lebih banyak Kawasan Perlindungan dibandingkan negara-negara lain (Rare.org, 2010). Keberadaan Filipina di dalam pusat biogeografi segitiga terumbu karang membuat keanekaragaman hayati laut Filipina sangat mengagumkan terkhusus dibagian kawasan tengah Filipina. Terutama dalam Alur Pulau Verde antara Mindoro dan Luzon, serta di wilayah Visayas di kawasan sebelah selatan (Magdalena.M, 2016, hal. 6).

Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Filipina didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan panduan untuk keseluruhan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Filipina (NPOA) dan untuk berfungsi sebagai poin utama negara. NCC Filipina dipimpin oleh Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dan Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan di bawah Departemen Pertanian. Anggotanya termasuk perwakilan dari Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Liga Kotamadya Filipina, organisasi non-pemerintah, institusi akademis dan sektor bisnis.

NPOA Filipina mencerminkan tujuan dan sasaran Rencana Aksi Regional (RPOA) CTI-CFF dan memiliki enam tema lintas sektoral yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan kerangka pengelolaan pesisir terpadu yang telah diterapkan di Filipina. Tema-tema ini mencakup persyaratan penelitian, memungkinkan kebijakan, perencanaan berdasarkan praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik, pengembangan kapasitas,

penegakan hukum lingkungan dan kampanye informasi dan pendidikan.

b. Indonesia

Indonesia tercatat memiliki Keanekaragaman hayati lebih kurang sebanyak 590 spesies karang keras. Kehidupan biota di terumbu karang Indonesia terdapat sekitar 2.200 spesies ikan karang dimana, 197 spesies dianggap merupakan endemik Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian besar spesies mempunyai ruang yang luas dan saling berhubungan diseluruh kawasan segitiga terumbu karang (Magdalena.M, 2016, hal. 6)

Indonesia menjadi penggagas kerjasama multilateral ini. Indonesia memberikan sumbangsih untuk memprakarsai penyelamatan ekosistem bawah laut, dengan menggandeng tujuh negara, dengan enam negara yang merupakan negara kawasan segitiga terumbu karang, dan ditambah dua negara mitra. Indonesia melihat banyaknya masalah yang menimpa ekosistem laut, dan melihat banyaknya aktivitas manusia yang menyebabkan rusaknya terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang. Tidak hanya itu saja, dedikasi Indonesia untuk menyelamatkan ekosistem bawah lautnya dibuktikan dari kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk mendirikan gedung sekretariat di Manado, Indonesia.

Tidak hanya itu saja, Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan Rp 5,5 juta untuk pembangunan pusat seluas 6.084 meter persegi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyisihkan lahan seluas 15.000 meter persegi untuk perluasan dan fasilitas pendukung di pusat (Security C. T., 2009). Pusat CTI telah dirancang dan dibangun untuk tujuan koordinasi pusat,

fasilitasi dan kolaborasi dari enam Pihak Ketiga CTI.

c. Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon dicirikan oleh laut yang mengelilinginya. Solomon terletak di wilayah yang lebih luas yang dikenal sebagai Segitiga Terumbu Karang. Di perairan ini telah dinominasikan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban alam Oseania dan digambarkan sebagai “Amazon of the ocean” untuk keragaman karang dan kehidupan laut tropis yang sangat besar (Tomahawk, 2018).

Hampir 500 spesies karang keras dan lunak ditemukan membentuk 5.750km² terumbu karang di Solomon (Tomahawk, 2018). Terumbu karang ini penuh dengan kehidupan, mulai dari ikan titan trigger, siput neon berwarna hijau dan oranye dan masih banyak lainnya, lengkap hingga barakuda, hiu pun ada. Wilayah bawah laut Solomon menyediakan tempat bertelur dan rute migrasi untuk 1000 spesies ikan karang, lumba-lumba, sinar, hiu, dan enam dari tujuh spesies penyu laut di dunia. Hal inilah yang membuat Kepulauan Solomon menjadi salah satu negara paling tinggi didunia dalam hal keanekaragaman hayati dan kekayaan spesies biota laut.

CTI-CFF NPOA Kepulauan Solomon berfokus pada mengadopsi pendekatan berpusat pada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya terpadu dimana masyarakat akan menjadi pendorong utama dan juga penerima manfaat pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Hal ini didukung oleh strategi lintas sektoral seperti pengembangan legislasi kebijakan dan kemitraan kelembagaan, pengelolaan dan koordinasi data untuk pengambilan keputusan, dan pengembangan kapasitas. NPOA bertujuan untuk memastikan

bahwa 25% wilayah pesisir, DAS, dan pesisir di Kepulauan Solomon berada di bawah 40% pengelolaan yang lebih baik pada tahun 2015 melalui pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat dan pendekatan pengelolaan pesisir terpadu (Security C. T., 2009).

d. Malaysia

Malaysia merupakan bagian dari Coral Triangle, sebuah wilayah yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Di lautan Malaysia terdapat 450 spesies karang keras. Sedangkan diseluruh Malaysia terdapat sekitar 925 spesies ikan yang hidup di terumbu karang tersebut. Tidak hanya itu, sekitar 73 spesies mangrove yang ada didunia, 40 spesiesnya terdapat di Malaysia (Magdalena.M, 2016, hal. 6).

Terumbu karang merupakan sumber ekologis dan ekonomi yang penting, menyediakan berbagai layanan ekosistem berharga bagi jutaan orang di seluruh dunia. Di Malaysia, diperkirakan nilai terumbu karang sebesar RM 50 miliar (US \$ 13,4 miliar) per tahun. Namun, terumbu karang Malaysia masih terancam, seperti juga banyak terumbu karang di seluruh dunia (Nesha, 2016). Dengan melihat bahwa kerusakan pada keanekaragaman terumbu karang yang ada di Malaysia, Malaysia bekerjasama dengan beberapa mitra, seperti IGO, NGO terkait guna menyelamatkan biota laut tersebut.

Setelah bergabung dengan CTI CFF, Malaysia memiliki Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Malaysia yang berfokus pada pengembangan dan implementasi pendekatan manajemen inovatif untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan yang dapat memacu sumber pertumbuhan baru untuk kehidupan kita. Ini mencakup 12 prinsip

panduan yang mewakili komitmen Malaysia dalam berbagai perjanjian, kebijakan dan komitmen deklarasi di forum internasional dan berisi 134 tindakan spesifik yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian lima sasaran Rencana Aksi Regional CTI-CFF.

e. Papua Nugini

Dengan daerah dekat dengan kawasan Papua, Indonesia, dimana banyaknya hidup habitat terumbu karang disana, Papua Nugini juga memiliki banyak jenis terumbu karang. Papua New Guinea juga berada di kawasan segitiga terumbu karang. Tatanan khas milik Papua Nugini, baik dalam ekosistem laut dan darat, terdapat lebih dari 14.500 Km² terumbu karang di Papua Nugini atau kurang lebih sekitar 6% dari luas terumbu karang dunia. Sekitar 514 spesies karang keras terletak di Papua Nugini bagian utara, lebih dari 860 spesies ikan karang terdapat di teluk kimbe di pantai utara Britania Baru serta 511 spesies karang keras dan lebih dari 1.100 spesies ikan karang terdapat di Teluk Milne (Magdalena.M, 2016, hal. 6).

Program Kelautan PNG tentang Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan dari tahun 2010-2015 mewujudkan Rencana Aksi Nasional PNG CTI-CFF (NPOA) dan menggabungkan lima tujuan Rencana Aksi Regional (RPOA) CTI-CFF. Program ini mengintegrasikan tindakan prioritas dari semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara terpadu untuk memastikan pengelolaan yang efektif terhadap habitat dan sumber daya laut negara tersebut untuk menopang populasi pesisirnya (Security C. T., 2009).

Sejak berdirinya, NCC PNG telah berkembang menjadi unit inklusif yang

menganjurkan institusi akademis, organisasi non-pemerintah dan pemimpin lokal sebagai mitra vital dalam pelaksanaan NPOA. Di tingkat regional, NCC telah memimpin dalam menyelenggarakan pertemuan CTI-CFF dan beberapa acara regional seperti Pertemuan Pejabat Senior CTI-CFF Ketiga di tahun 2009 dan Kursus CTI-CFF tentang Adaptasi Perubahan Iklim untuk Komunitas Pesisir dan Pelatihan untuk Pelatih pada bulan September 2011. Di tingkat nasional, NCC telah memimpin dalam implementasi pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan di masyarakat lokal; pelaksanaan adaptasi perubahan iklim dan prinsip perikanan berkelanjutan di kawasan lindung laut utama, serta memfasilitasi kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan lingkungan laut mereka secara efektif.

f. Timor Leste

Berbatasan langsung dengan Indonesia dan menjadi negara termuda, Timor Leste merupakan negara ketiga terkaya di dunia untuk keanekaragaman hayati ikan terumbu karang (National Geographic Indonesia , 2013). Timor Leste menempati separuh bagian di barat daya Pulau Timor berbatasan dengan Laut Sawu di barat, Laut Banda di utara, dan Laut Timor di selatan. Negara berpenduduk sekitar satu juta jiwa ini terletak di atas Australia di Kepulauan India Timur – Nusantara, Indonesia

Komite Koordinasi Nasional CTI-CFF Timor-Leste memimpin pelaksanaan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF bekerjasama dengan mitra pembangunan dan pakar organisasi non-pemerintah. NCC terdiri dari perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Perikanan dan instansi

pemerintah terkait lainnya yang menjadi focal point utama bagi beberapa kelompok kerja teknis.

Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Timor-Leste memiliki tujuan dan target yang sama dengan Rencana Aksi Regional (RPOA) CTI-CFF dan selaras dengan kebijakan, sistem keuangan, program pengembangan mitra pemerintah yang ada dan yang paling penting dengan sasaran pembangunan berkelanjutan dan Skema Pengentasan Kemiskinan dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan (Security C. T., 2009). NPOA menyadari dan memanfaatkan keragaman budaya dan pengalaman yang ditemukan di Timor-Leste dan dianggap sebagai dokumen yang hidup dan berkembang yang akan menyesuaikan diri dengan perubahan terus-menerus dalam latar belakang politik dan sosial Timor-Leste.

B. Perkembangan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)*

Enam negara Kawasan Segitiga Terumbu karang, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste, masing-masing telah mengembangkan sistem kawasan lindung laut (*Marine Protected Areas*) di tingkat nasional maupun lokal. Lebih dari 1.900 kawasan yang mencakup 200.881 km² (1,6% dari zona ekonomi eksklusif untuk wilayah kawasan ini) (Security C. T., 2009).

Semenjak didirikannya CTI CFF pada tahun 2009, telah banyak hal yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mencapai tujuan dari CTI CFF sendiri. Banyak juga kejadian dan pencapaian yang dilakukan oleh keenam negara anggota dengan kerjasama dengan mitra. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan perkembangan CTI berdasarkan isu yang diangkat. Sebagai forum multilateral, CTI-CFF bekerja di tiga isu penting terkait tata kelola kelautan dan perikanan yaitu konservasi laut,

pengelolaan perikanan, dan adaptasi perubahan iklim (Muhajir, 2015).

1. Pengelolaan Perikanan

Kawasan Segiriga terumbu karang menyebar lebih dari enam juta kilometer persegi samudera di sekitar Asia Tenggara dan Pasifik barat, dan merupakan salah satu wilayah terumbu karang yang paling penting di dunia ini. Kawasan segitiga terumbu karang menampung lebih dari 500 spesies karang keras, 3000 spesies ikan dan daerah mangrove terbesar di dunia. Sumber daya ini memasok makanan dan mendukung penghidupan sekitar 500 juta orang dan sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi kawasan Asia Pasifik (CEED, 2015). Sudah tujuh tahun CTI terbentuk yang diprakarsai oleh enam negara kawasan segitiga terumbu karang dunia. Bagi keenam negara yang berada dalam kawasan Coral Triangle (CT6), kelestarian laut memiliki dampak besar karena menjadi sumber penghidupan bagi 120 juta orang penduduk. Indonesia sangat berkepentingan dalam kerja sama regional itu karena luas terumbu karang Indonesia terluas di antara 6 negara dan menjadi sasaran "empuk" praktik perikanan ilegal.

Dalam coremap CTI yang tertuang dalam RPOA CTI 2010-2020, hingga saat ini perkembangan dalam kawasan sektor perikanan masih dikembangkan dan belum memiliki titik yang maksimal.

2. Adaptasi Perubahan Iklim

CTI CFF memiliki lima program, salah satunya merupakan program yang tertuju pada perubahan iklim, dengan nama *Climate Change Adaption* (CCA). Pada tahun 2015 *Working Group* (WG) menerbitkan *Region-wide Early Action Plan for CCA* (REAP dan *Local Early Action Plan for CCA* (LEAP). Dokumen-dokumen ini dikembangkan melalui serangkaian pertemuan panggilan, REXs, lokakarya dan pertemuan formal dengan focal point negara CCA bersama dengan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa negara dengan bantuan LSM dan mitra menggunakan REAP dan LEAP dalam melakukan berbagai kegiatan terkait CCA di tingkat lokal. WG telah mengembangkan indikator M & E mereka dan kenyataannya, ini sudah terintegrasi dalam CT Atlas. Negara-negara hanya perlu memperbarui CT Atlas untuk menghasilkan data tentang CCA di Wilayah CT. Kelompok ini telah melakukan total empat Bursa Regional dan pertemuan TWG dengan berbagai tema dengan tema terakhir yang berfokus pada pembentukan *Center of Excellence* di CCA. *Working Group* juga bertujuan untuk mengembangkan Kursus Eksekutif CCA yang dirancang bagi para pemimpin lokal untuk melatih mereka tentang bagaimana membuat masyarakat mereka tahan terhadap perubahan iklim. Kelompok ini didukung secara teknis oleh WWF (Security T. C., 2009).

3. Konservasi Laut

Menjadi hal yang penting dalam melindungi laut. Memberikan perhatian khusus pada ekosistem bawah laut untuk masa depan. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia bersepakat dengan *Coral Triangle Initiative* untuk membudidayakan perairan laut seluas 100.000 km² dalam Kawasan Konservasi Perairan, sebelumnya pemerintah telah meresmikan beberapa Taman Nasional, diantaranya Taman Nasional Laut Sawu seluas 35.000 km² ditahun 2009, Taman Nasional Laut Anambas seluas 12.600 km² pada tahun 2011. Sehingga pada tahun 2011, laut Indonesia telah memiliki 139.000 km² Kawasan Konservasi Perairan. Hingga saat ini, total kawasan konservasi sebanyak 172, dengan luas kawasan konservasi seluas 19.144.694,28 Ha (lihat pada beranda KKP pada Sistem Informasi Geografis). Pada tahun 2020 rencananya Indonesia akan memperluas kawasan hingga mencapai 200.000 km².

Malaysia memiliki banyak Kawasan Konservasi Perairan yang luas, salah satu kawasan konservasi yang diusulkan adalah Taman Tun Mustapha dengan luas

100.000 km² untuk dikukuhkan dilepas pantai Sabah utara sehingga memperluas kawasan konservasi yang ada di Malaysia. Saat ini terdapat 42 kawasan konservasi yang dikelola oleh Departement Taman Laut di Semenanjung Malay. Total keseluruhan Kawasan Konservasi Perairan yang dimiliki Malaysia sekitar 93 wilayah. Papua Nugini telah mendirikan 96 Kawasan Konservasi Perairan untuk melestarikan sebanyak 5% terumbu karang di wilayah tersebut. Data menunjukkan Kawasan Konservasi mampu menurunkan tekanan kerusakan pada terumbu karang.

Kawasan konservasi Nasional untuk melestarikan 15% wilayah laut kabupaten dengan sistem larangan penangkapan serta Strategi Cagar Laut Filipina pada 2004. Diwacanakan pada tahun 2020, 10% terumbu karang berada dalam kawasan larangan tersebut. Ditahun 2010, survey menemukan kemajuan yang signifikan dimana 5% perairan kabupaten sudah berada di dalam Kawasan Konservasi Perairan dan 0,5% berada dalam wilayah larangan tangkap. Dari survey yang dilakukan, 25 Kawasan Konservasi Perairan dinilai efektif menurunkan tekanan yang diakibatkan tangkapan berlebih, 112 kawasan dinilai sebagian efektif, dan tidak efektif sebanyak 61 kawasan. Dari beberapa kawasan konservasi nasional yang dinilai efektif 2 diantaranya adalah Terumbu Karang Tubbataha dan Pulau Apo. Taman Nasional Nino Konis Santana seluas 1.240 km² yang diantaranya mencakup 680 km² daratan dan 56-km² lautan adalah taman nasional pertama di Timor Leste yang terletak di ujung pantai timur negara ini didirikan pada tahun 2007. Taman Nasional Timor Leste sedang merencanakan pengelolaan namun masih menunggu penetapan status hukum yang resmi walaupun kawasan tersebut telah terlebih dahulu beroperasi. Pemerintah setempat menggandeng *Coral Triangle Support Partnership (CTSP)*

Sejak 2003, *The Solomon Islands Locally Managed Marine Area (SILMMA) Network* atau Jaringan LMMA Kepulauan Solomon yang dikelola oleh masyarakat memberikan manfaat yang sangat besar dalam pembangunan Kawasan Konservasi Perairan dalam melestarikan sumberdaya di negara tersebut. Untuk melancarkan pelaksanaan pengelolaan kawasan bagi masyarakat secara hukum yang sah, sehingga pada tahun 2010, dikeluarkan Undang-Undang tentang Daerah Lindung yang merupakan perkembangan pendekatan pengelolaan terpadu antar pejabat pemerintahan negara ini guna menutupi kekurangan sistem yang terjadi saat ini. Saat ini terdapat 127 Kawasan Konservasi Perairan yang telah diteliti. Widi Pratikno, selaku direktur CTI CFF menyebutkan bahwa selama tahun 2016, akan terus melakukan penguatan kelembagaan dengan mendorong terbitnya sejumlah peraturan, terutama di Indonesia yang menjadi pusat dari kawasan Segitiga Karang.

C. *Mandat Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)*

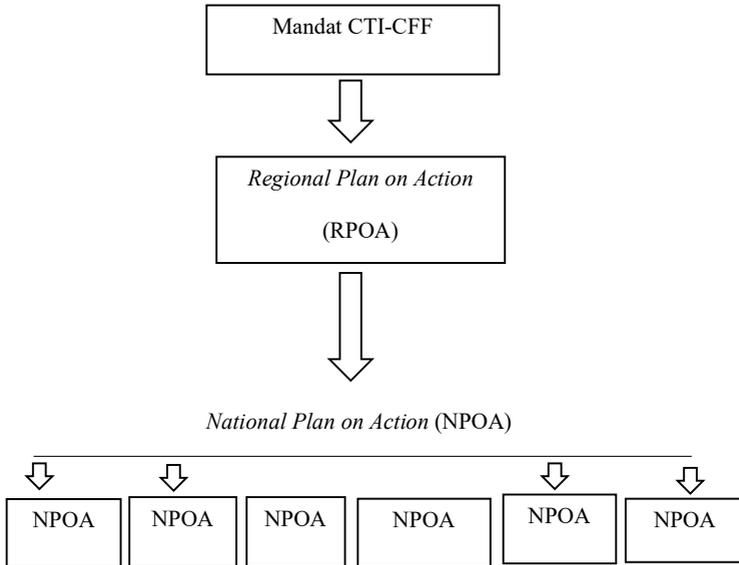
Mandat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki lima arti (i) perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, **perkumpulan**, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu; (ii) kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dari suatu badan atau organ kekuasaan atas nama badan atau organ kekuasaan tersebut; (iii) instruksi atau wewenang yang diberikan oleh organisasi (perkumpulan dan sebagainya) kepada wakilnya untuk melakukan sesuatu dalam perundingan, dewan, dan sebagainya; (iv) surat perintah bayar dan (v) perwakilan atas suatu wilayah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; pemberian kekuasaan. Dalam hal ini, kelima arti memiliki makna dan simpulan bahwa mandate merupakan sebuah perintah ataupun tugas.

CTI CFF memberikan mandat kepada setiap negara anggota saat pembentukan awal mula CTI pada tahun 2009, dengan memberikan perintah untuk setiap anggota untuk mempromosikan kerjasama regional, berbagi pelajaran, dan memfasilitasi pembelajaran di enam negara Coral Triangle

The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Regional Secretariat was created during the First CTI-CFF Senior Officials Meeting in Bali in December 2007. It is mandated to promote regional cooperation, sharing of lessons, and facilitate learning across the six Coral Triangle countries - Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea Philippines, Solomon Islands and Timor-Leste. The Regional Secretariat also coordinate and monitors the progress in achieving the CTI-CFF Regional Plan of Action goals (Security C. T., 2009).

Kegiatan utamanya mencakup bidang-bidang berikut: pengembangan organisasi, penjangkauan dan komunikasi, koordinasi dan mekanisme regional, kelompok kerja teknis dan tematik, pengembangan laporan regional utama, dan pengembangan kapasitas. Ini juga berfungsi sebagai penghubung utama dan untuk semua fungsi resmi CTI-CFF seperti Rapat Pejabat Senior CTI-CFF tahunan dan Rapat Menteri CTI-CFF tahunan. Bermarkas di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Indonesia. Mandat CTI CFF merupakan sebuah mandat yang ditujukan untuk keenam negara CT6 yang diadopsi dalam *Regional Plan on Action*. Dari RPOA diturunkan kepada setiap negara menjadi *National Plan on Action*. Dari keenam negara anggota, memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melaksanakan mandat yang ada. Memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup ekosistem laut yang ada di kawasan segitiga terumbu karang. Secara mudahnya dalam memahami mandate CTI CFF, berikut bagan mandat yang diberikan CTI CFF:

Bagan 3.1
Korelasi mandat dengan NPOA tiap Negara Anggota



Dilihat dari NPOA yang digambarkan dalam bagan di atas, tiap NPOA negara anggota memiliki rencana yang berbeda, namun memiliki tujuan dan target yang sama yakni mensukseskan target yang dimiliki oleh CTI CFF secara keseluruhan dalam menyelamatkan ekosistem laut.